

BOOK CHAPTER

TEORI KELEMBAGAAN BARU DAN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Oleh:

P. Eko Prasetyo

Andryan Setyadharna

Nurjannah Rahayu Kistanti

**BETA OFFSET
YOGYAKARTA**

BOOK CHAPTER

**Teori Kelembagaan Baru dan Social
Entrepreneurship**

Oleh:

P. Eko Prasetyo

Andryan Setyadharna

Nurjannah Rahayu Kistanti

Ed. 1. Cet. 1. Yogyakarta: Beta Offset, 2020
viii + 132 hal; 14,5 x 21 cm.

ISBN 978 - 979 - 8541 - 97 - 1

Cetakan pertama, Oktober 2020

Hak Cipta © 2020 ada pada Penulis

Hak penerbitan ada pada Beta Offset Yogyakarta

Dicetak dan diterbitkan Oleh:

Beta Offset Kavling Madukismo 28,

Seturan Caturtunggal Depok Sleman - Yogyakarta, 55281

Telp. (0274) 485512

E-mail: betaoffsetyk@gmail.com

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat Rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga penulis dapat menyelesaikan book chapter ini dengan judul Teori Kelembagaan Baru dan Sosial Entrepreneurship. Book Chapter ini terdiri dari 5 Cahpter, yaitu; Chapter-1 Membahas tentang Teori kelembagaan baru dan pertumbuhan ekonomi, Chapter-2; Kewirausahaan dan daya saing, Chapter-3; Teori kelembagaan baru dan daya saing, Chapter-4; Inovasi kelembagaan ekonomi baru, dan Chapter-5; social entrepreneurship sebagai mitigasi dampak-Covid-19.

Berbagai upaya telah penulis lakukan agar publikasi dalam bentuk book chapter ini dapat dianggap sebagai karya ilmiah yang baik. Namun demikian, masih disadari adanya kelemahan dan kekurangan untuk dapat dianggap sebagai karya ilmiah yang sempurna. Karena itu, taka da gading yang tak retak, jika masih ada kritik dan saran yang membangun demi lebih sempurnanya karya tulis book chapter ini, penulis masih dapat menerima kritik dan saran tersebut dengan senang hati. Akhir kata semoga book chapter ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Semarang, Oktober 2020

Ketua Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Prakata	v
Daftar Isi	vii
CHAPTER -1: TEORI KELEMBAGAAN BARU DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	1
Absrak	1
A. Pendahuluan	2
B. Kritik Metodologi dalam sejarah NIE	6
C. Kerangka Kerja Ekonomi Kelembagaan	9
D. Human and Social Capital dalam NIE dan Economic Growth	13
E. Keterkaitan Ekonomi Kelembagaan dan pertumbuh- an Ekonomi	15
F. Simpulan dan Rekomendasi	19
Referensi	20
CHAPTER -2: KEWIRAUSAHAAN DAN DAYA SAING	25
Absrak :	25
A. Pendahuluan	26
B. Kopentensi Kewirausahaan & Daya Saing	37
C. Metode Pengembangan Riset Kewirausahaan & Daya Saing	43
D. Produktivitas dan Daya Saing Kewirausahaan	47
E. Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing	53
F. Simpulan dan Rekomendasi	57
Referensi	57
CHAPTER -3: TEORI KELEMBAGAAN BARU DAN DYA SAING	67
Absrak:	67

A. Pendahuluan	68
B. Metodologi Ukuran Daya Saing dan Lembaga	71
C. Kerangka Kerja Ekonomi Kelembagaan & Daya Saing	73
D. Ekonomi Kelembagaan Baru dan Pembangunan Ekonomi Modern	76
E. Ekonomi Kelembagaan dan Kesejahteraan Masyarakat	80
F. Simpulan dan Rekomendasi	84
Referensi	85

CHAPTER -4: INOVASI KELEMBAGAAN EKONOMI BARU

Abstrak:	91
A. Pendahuluan	92
B. Inovasi Sosial sebagai Inovasi Kelembagaan	96
C. Inovasi Lingkungan Kelembagaan	100
D. Biaya Transaksi dalam Dimensi Inovasi Kelembagaan Baru	105
E. Inovasi Kelembagaan dalam Efisiensi Sumber Daya ..	107
F. Penutup	109
Referensi	110

CHAPTER -5: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP SEBAGAI MITIGASI DAMPAK COVID-19

Abstrak	113
A. Pendahuluan	114
B. Social Entrepreneurship sebagai Mitigasi Covid-19	116
C. Social Entrepreneurship dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi	119
D. Social Entrepreneurship sebagai Mitigasi Krisis Ekonomi	123
E. Penutup	127
Referensi	128

Chapter 1

Teori Kelembagaan Baru dan Pertumbuhan Ekonomi

**P. Eko Prasetyo, Andryan Setyadharma, &
Nurjannah Rahayu Kistanti**

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi UNNES
Email; pekoprasetyo@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penulisan book chapter 1 ini adalah untuk menganalisis teori dan peran ekonomi kelembagaan baru (NIE) terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Peran parameter ekonomi kelembagaan saat ini semakin penting sebagai vasilitator untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya dan memaksimalkan hasil serta mengurangi risiko. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi menyiratkan proses yang sangat kompleks dan multidimensi, mempengaruhi banyak faktor seperti ekonomi, teknologi, kelembagaan, politik, sosial dan budaya. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada lembaga-lembaga politik dan kapasitas mereka untuk mendefinisikan dengan cara yang lebih jelas dan dapat diterima tujuan bersama. Hampir semua indikator secara historis dari teori sebelumnya dalam pembangunan telah mengalami stagnasi secara signifikan dibandingkan dengan peran ekonomi kelembagaan ini. Di mana pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan semakin nampak sangat tergantung dari peran dan kebijakan kelembagaan yang ada di dalam suatu Negara yang bersangkutan. Selanjutnya, mengingat dimensi politik dari kapasitas negara, tentu harus dipertimbangkan juga pendekatan institusional pembangunan berkelanjutan yang baru yaitu dimensi politik institusi yang mendukung pembangunan ekonomi sebagai dasar ekonomi kelembagaan baru. Hasil studi literature telah banyak yang menegaskan bahwa ada saeling ketekaitan antara ekonomi kelembagaan baru dengan pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kewirausahaan. Hasil riset menegaskan ada faktor pendorong teknologi dapat terbentuknya kewirausahaan dan kelembagaan yang paling dominan adalah adanya kapasitas Sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Sedangkan, social capital sebagai faktor penguat penting dalam mendorong daya saing.

Kata kunci: human capital, social capital, ekonomi kelembagaan baru; pertumbuhan ekonomi; kewirausahaan

A. Pendahuluan

Lembaga 'telah menjadi kata kunci dalam diskusi politik dan ilmiah baru-baru ini. Ini mencerminkan kesadaran luas bahwa ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik mensyaratkan kerangka kerja kelembagaan yang efektif untuk melakukan keajaibannya. Dalam terang turbulensi global, kerusuhan keuangan, perkembangan di bekas Blok Timur, terus terbela-kang di 'Dunia Ketiga', dll., Semakin banyak pengusaha, ekonom, dan politisi (dari neokonservatif ke Kiri Baru) ber-konvergensi di gagasan bahwa pembangunan ekonomi tanpa 'institusi yang baik' dan negara yang efektif adalah mustahil (Ankarloo, 2018).

Definisi terkenal dari North (1990) tentang suatu institusi adalah bahwa ia terdiri dari aturan main dalam masyarakat. Aoki (2001, 2007) menguraikan hal ini dan mengusulkan bahwa lembaga secara kolektif diakui aturan dan simbol ditambah keyakinan perilaku (harapan) agen tentang pilihan dan niat pemain lain. Pemain mendasarkan perilaku mereka sendiri (strategi, tindakan, dll.) Pada keyakinan ini. Perangkat kepercayaan ini juga disebut 'model mental' (Denzau dan Utara, 1994) atau 'model sosial' (Eggertsson, 2005). 'Aturan yang bermakna' adalah aturan yang secara umum dihormati dan dipatuhi. Misalnya, jika aturan mengatakan berhenti di lampu lalu lintas merah (simbol), dan orang-orang di sekitar Anda tampaknya melakukannya, Anda mungkin akan melakukannya juga. Tetapi jika tidak ada yang tampaknya mematuhi, Anda mungkin akan berhenti mematuhi aturan juga. Dengan demikian aturan 'berhenti di lampu lalu lintas merah' tidak lagi berarti.

Aoki (2007) menekankan bahwa institusi adalah pola interaksi sosial yang mandiri dan berkelanjutan. Aturan yang mengatakan mengemudi di jalur kanan adalah mandiri ((jika semua orang melakukannya, saya juga akan melakukannya,

meskipun saya tidak perlu tahu undang-undang lalu lintas yang rumit di belakangnya'). Aturannya juga menonjol ('jika saya tidak mengemudi di jalur sebelah kanan, saya akan menabrak mobil lain'). Selain itu, ini mewakili pola interaksi sosial ("Saya melihat orang lain melakukannya, jadi saya bergabung, dan orang lain melakukan hal yang sama"). Aturan mengemudi di jalur kanan juga bermakna, karena masuk akal dan umumnya dihormati. Setiap orang yang mengendarai mobil tahu dan dapat yakin bahwa pengemudi lain juga mengetahuinya.

Definisi terkenal dari North (1990) tentang suatu institusi adalah bahwa ia terdiri dari aturan main dalam masyarakat. Aoki (2001, 2007) menguraikan hal ini dan mengusulkan bahwa lembaga secara kolektif diakui aturan dan simbol ditambah keyakinan perilaku (harapan) agen tentang pilihan dan niat pemain lain. Pemain mendasarkan perilaku mereka sendiri (strategi, tindakan, dll.) Pada keyakinan ini. Perangkat kepercayaan ini juga disebut 'model mental' (Denzau dan Utara, 1994) atau 'model sosial' (Eggertsson, 2005). 'Aturan yang bermakna' adalah aturan yang secara umum dihormati dan dipatuhi. Misalnya, jika aturan mengatakan berhenti di lampu lalu lintas merah (simbol), dan orang-orang di sekitar Anda tampaknya melakukannya, Anda mungkin akan melakukannya juga. Tetapi jika tidak ada yang tampaknya mematuhi, Anda mungkin akan berhenti mematuhi aturan juga. Dengan demikian aturan 'berhenti di lampu lalu lintas merah' tidak lagi berarti.

Aoki (2007) menekankan bahwa institusi adalah pola interaksi sosial yang mandiri dan berkelanjutan. Aturan yang mengatakan mengemudi di jalur kanan adalah mandiri (jika semua orang melakukannya, saya juga akan melakukannya, meskipun saya tidak perlu tahu undang-undang lalu lintas yang rumit di belakangnya'). Aturannya juga menonjol ('jika saya tidak mengemudi di jalur sebelah kanan, saya akan menabrak mobil lain'). Selain itu, ini mewakili pola interaksi

sosial ("Saya melihat orang lain melakukannya, jadi saya bergabung, dan orang lain melakukan hal yang sama"). Aturan mengemudi di jalur kanan juga bermakna, karena masuk akal dan umumnya dihormati. Setiap orang yang mengendarai mobil tahu dan dapat yakin bahwa pengemudi lain juga mengetahuinya.

Teori perkembangan ekonomi kontemporer telah memperluas pengetahuan kita dengan menjelaskan mengapa beberapa negara kaya dan negara lain miskin, dengan menganalisis institusi, yaitu norma-norma perilaku yang memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi kelembagaan baru, aspek kelembagaan dari pertumbuhan ekonomi semakin diperlakukan, dan terutama asal beberapa lembaga. Apa saja lembaga yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan lembaga mana yang memperlambat pertumbuhan ekonomi? Mengapa di beberapa negara telah dibentuk lembaga tertentu yang membawa efisiensi lebih tinggi, dan di beberapa negara lain lembaga memiliki efisiensi yang jauh lebih rendah?

Pertanyaan-pertanyaan dan dilema ini, masing-masing penelitian untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dalam beberapa tahun terakhir semakin menyatukan ilmu ekonomi dengan ilmu keadilan. Sistem hukum yang diatur dengan baik di suatu negara mewakili nilai bagi para ekonom dan pengacara, tetapi motivasi mereka di suatu tempat berbeda. Pengacara, memandang sistem sebagai nilai sendiri, sedangkan bagi ekonom sistem seperti itu memiliki nilai institusional, karena peraturan tersebut memastikan memaksimalkan efisiensi ekonomi dan sosial, (Nuhui, 2015).

Kesejahteraan. Pada awalnya kita harus menekankan bahwa lingkungan kelembagaan saat ini tidak cocok untuk secara memadai mempengaruhi percepatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Untuk negara-negara yang berada di bawah masa transisi, perwakilan dari bidang ini hadir dan

memberikan proposal yang memadai yang akan mempengaruhi percepatan dan penguatan inovasi kelembagaan, yang dalam jangka pendek akan menyediakan sistem hukum yang efisien, hukum persaingan yang efisien, perlindungan konsumen dan efektif sistem regulasi yang akan memengaruhi penciptaan sistem keuangan yang aman dan berkelanjutan.

Istilah-istilah utama yang menjadi sandaran ekonomi institusional baru adalah: institusi, pembangunan ekonomi, modal, kontrak, dll. Dalam konsep ini disajikan berbagai dilema: mengapa beberapa negara dengan cara yang sukses dan sangat efisien mengatur ekonomi mereka, sementara negara lain gagal mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, atau mencapai pembangunan ekonomi yang tidak mencukupi yang tidak menyediakan investasi demografis? Banyak penulis berpendapat bahwa jawaban untuk pertanyaan ini terutama ditentukan oleh pentingnya dan peran lembaga dalam ekonomi negara-negara ini.

Lembaga sangat penting untuk pembangunan ekonomi, yang membantu menjelaskan kegagalan pasar dan memberikan penjelasan untuk peran negara dalam ekonomi. Institusi terdiri dari kendala formal, seperti konstitusi, undang-undang, aturan, hak milik, dan lainnya. Kendala informal, seperti kode perilaku, perjanjian, aturan perilaku yang diberlakukan sendiri, (North, 1994). Pengukuran institusi meliputi: mengukur kualitas institusi, modal sosial, fitur sosial dan politik dan ketidakstabilan politik. Sejumlah penelitian yang dilakukan dalam bidang ini telah memverifikasi bahwa kualitas institusi dan modal sosial memiliki korelasi positif dengan pembangunan ekonomi, sedangkan fitur sosial dan ketidakstabilan politik memiliki korelasi negatif, sedangkan untuk fitur politik institusi tidak didefinisikan saling ketergantungan yang signifikan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (Aron, 2000).

Jika institusi didefinisikan sedemikian rupa sehingga akan merangsang kegiatan ekonomi dan meningkatkan

produktivitas, maka pengaturan kelembagaan ini, secara tidak langsung dengan mengalokasikan sumber daya, akan menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Produktivitas sebagai rasio antara input dan output produksi akan meningkat jika dicapai untuk mengurangi biaya keseluruhan, biaya transaksional dan biaya transformatif. Yang pertama, berkaitan dengan pengukuran dan penegakan kontrak dan yang kedua terkait dengan biaya fisik produksi. Biaya transaksional dikurangi melalui perubahan kelembagaan, sementara biaya transformatif dikurangi melalui perubahan teknologi inovatif. Perubahan kelembagaan dan inovatif yang mempengaruhi pengurangan biaya transaksional (dan juga peningkatan produktivitas, dan yang terakhir dalam pertumbuhan ekonomi) adalah lembaga-lembaga yang meningkatkan pergerakan modal, mengurangi biaya informasi, mengurangi biaya transfer risiko, dan meningkatkan efisiensi penegakan kontrak.

B. Kritik Metodologi dalam sejarah NIE

Diakui bahwa penggunaan asumsi yang tidak realistis, yaitu diketahui kebohongan, apakah pada dasarnya ada kemungkinan pertahanan bagi mereka? Ya, secara historis, dalam subjek ekonomi, ya. Karena pelarian dari realisme yang kadang-kadang dilakukan oleh para ekonom, meskipun belum secara eksplisit oleh para eksponen adalah digunakan untuk mengadopsi strategi instrumental.

Lembaga 'telah menjadi kata kunci dalam diskusi politik dan ilmiah baru-baru ini. Ini mencerminkan kesadaran luas bahwa ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik mensyaratkan kerangka kerja kelembagaan yang efektif untuk melakukan keajaibannya. Dalam terang turbulensi global, kerusakan keuangan, perkembangan di bekas Blok Timur, terus berkembang di 'Dunia Ketiga', dll., Semakin banyak pengusaha, ekonom, dan politisi (dari neokonservatif ke Kiri Baru) berkonvergensi di gagasan bahwa pembangunan ekono-

mi tanpa 'institusi yang baik' dan negara yang efektif adalah mustahil.

Di sini orang menganut pandangan, bahwa konsep-konsep teoretis hanyalah instrumen untuk memahami dan memprediksi kejadian dalam kenyataan. Namun konsep dan teori itu sendiri tidak realistis atau tidak realistis sama sekali. Karena itu, mereka tidak membuat komitmen ontologis, dan tidak memiliki nilai kebenaran. Kritik terhadap mereka sia-sia. Dalam bidang ekonomi inipenalaran pada dasarnya terkait dengan Friedman (2017). North sendiri menggambarkan sikap ekonom: meskipun saya tahu sangat sedikit ekonom yang benar-benar percaya bahwa asumsi perilaku ekonomi akurat mencerminkan perilaku manusia, mereka (kebanyakan) percaya itu asumsi seperti itu berguna untuk membangun model pasar perilaku dalam ekonomi, (Nort, 2010) Poin utama dalam metodologi Friedman adalah pernyataan bahwa meskipun asumsi tersebut jelas-jelas salah, prediksi yang mengikuti teori bekerja 'seolah-olah' asumsi tersebut benar. Contohnya yang paling terkenal adalah bahwa daun pada pohon tentu saja tidak dihitung untuk memaksimalkan paparan sinar matahari tetapi jika kita menyelidiki posisi daun pada pohon itu berfungsi seolah-olah mereka melakukannya. Contoh lain adalah pemain biliard terampil, yang meskipun ia tidak menghitung menggunakan hukum fisika Newton bermain 'seolah-olah' dia melakukannya.

Tetapi bisakah masalah yang berkaitan dengan sejarah ekonomi diselesaikan dengan kepatuhan pada sesuatu seperti argumen Friedman? Dua masalah menentukan metodologi menyarankan jawaban negatif. Pertama, mengikuti argumen Friedman sendiri, metode 'as-if' paling baik menunjukkan asumsi yang tidak relevan, mengingat fakta bahwa tujuan dan ujian sains adalah untuk memprediksi. Motif dan tindakan aktual aktor sosial tidak relevan (hanya hasilnya yang penting). Untuk menjunjung tinggi metode ini untuk

sejarah, kita harus mempertahankan bahwa tujuan penelitian sejarah adalah untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam sejarah terlepas dari motif orang dan terlepas dari bagaimana mereka benar-benar berperilaku dan bertindak. Ini tentu tidak masuk akal.

Ada kontradiksi mendasar dalam upayanya menciptakan bentuk ekonomi neoklasik yang lebih realistis, lebih sosial dan lebih historis dalam pendekatannya. Konsep 'institusi' digunakan sebagai pengakuan terhadap masalah ekonomi neoklasik. Apa yang muncul dari analisis ini adalah gambaran di mana, sejauh mencoba mempertahankan unsur-unsur dasar teori neoklasik, yayasan non-realistis, asosial dan ahistoris muncul kembali sebagai hambatan utama untuk keberhasilan proyek. Ketika, di sisi lain, melalui analisis institusionalnya, mencoba untuk bergerak ke arah yang realistis, sosial dan historis, fondasi ekonomi neoklasiknya diberikan semakin berlebihan, atau bahkan bertentangan.

Dilema ini kemudian 'diselesaikan' dengan memasukkan, melalui pintu belakang, kepalsuan yang diketahui secara historis dan titik awal sejarah yang salah seperti 'pada awalnya ada pasar' dan dengan melihat sejarah 'seolah-olah' itu seperti yang diasumsikan oleh teori, daripada mengembangkan formulasi teoritis yang memasukkan penelitian sejarah. Sejarah dipahami dalam terang masa kini, bukan masa kini yang dipahami dalam terang sejarah. Singkatnya: di mana ada ekonomi di sana sangat sedikit sejarah, dan di mana ada sejarah ada sangat sedikit ekonomi. Dengan demikian, masalah ortodoksi ekonomi tidak diselesaikan tetapi diwariskan. Apa yang disorot adalah ketidakmampuan penjelasannya tentang bagaimana ekonomi kapitalis telah berkembang secara historis. Nort tidak begitu banyak program penelitian yang sedang berkembang, tetapi lebih merupakan demonstrasi kemunduran alat ekonomi neoklasik.

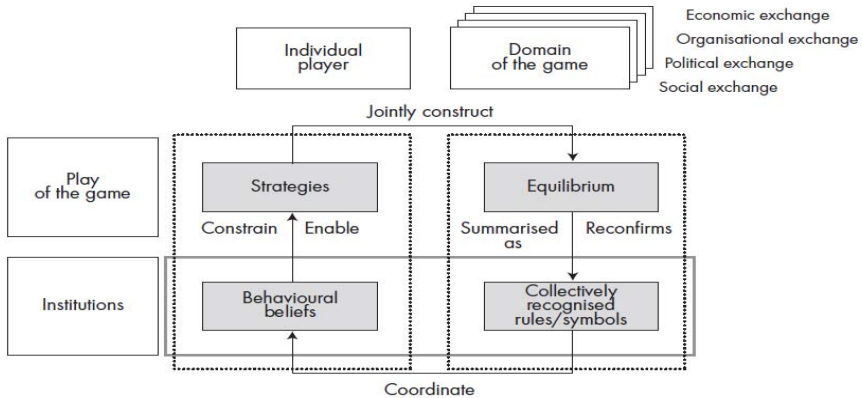
Pada akhirnya, seandainya kita menerima premis-premis dari pendekatan 'seolah-olah' terhadap sejarah

ekonomi yang mendasarinya, kita akan berisiko pindah dari teori yang diinformasikan secara ilmiah berdasarkan pada argumen rasional ke formulasi teoretis di mana 'apa pun terjadi', yang menjadi dasar akan terletak pada kepercayaan dan iman, jika bukan ideologi murni. Garis batas apa pun antara sejarah dan fiksi akan hilang. Mengenai politik, kesimpulan di atas menunjukkan bahwa sejauh ekonomi neoklasik gagal memberikan landasan teoretis yang memadai untuk dugaan berkah dari ekonomi pasar kapitalis, demikian juga. Di balik basa-basi teoritis mengintai apologetika kapitalis yang sama bahwa pendekatan neoklasik ahistoris terhadap ekonomi dan sejarah ekonomi telah dipupuk selama ini. bukan solusi untuk masalah ini tetapi bukti fakta bahwa masalahnya tetap ada.

C. Kerangka Kerja Ekonomi Kelembagaan

Lembaga, didefinisikan sebagai 'aturan dengan keyakinan bersama', dapat digambarkan seperti dalam kerangka kerja oleh Aoki (2001) (Gambar 2.1). Institusi diwakili oleh kotak-kotak bawah pada gambar. 'Permainan permainan' mengacu pada strategi (perilaku aktual) individu, dan ini didasarkan pada keyakinan mereka. Ini mungkin merupakan keseimbangan, seperti dalam kasus mengemudi di jalur kanan. Keseimbangan ini kemudian menegaskan kembali aturan yang diakui secara kolektif (semua orang tahu mengemudi di jalur kanan). Tapi itu juga menegaskan kembali dirinya dalam aturan dan simbol yang diakui secara kolektif. Saya hanya perlu melihat simbol seperti plang untuk mengetahui bahwa peraturan memang untuk mengemudi di sebelah kanan (sementara di Inggris saya segera mengetahui bahwa itu adalah sebaliknya). Atau saya hanya perlu melihat beberapa orang mengemudi di jalur kanan (atau melihat mereka di jalur kiri di Inggris). Namun, Aoki menambahkan bahwa 'keseimbangan' tidak berarti bahwa banyak keseimbangan tidak mungkin terjadi. Lembaga adalah konstruksi

yang dirancang secara manusiawi dan mungkin beragam. Jadi, misalnya, mungkin ada perbedaan lokal dalam cara melakukan sesuatu.



Gambar-1. Kerangka Kerja Institusi sebagai aturan dengan keyakinan (Sumber; Aoki, 2001).

Fitur utama dari NIE (dan ekonomi secara umum), tetapi yang hilang dari gambar, adalah penegakan, yang Aoki (2001: 8) mengintegrasikan ke dalam strategi dan kotak keyakinan perilaku. Jika seseorang bertindak dengan cara ini dan itu, maka beberapa aktor lain (katakanlah, pengadilan atau pemerintah) biasanya akan bertindak dengan cara ini dan itu (sehingga konsekuensi ini dan itu akan menimpa dirinya). Berhenti di lampu lalu lintas merah diberlakukan oleh polisi, menjadikannya sebuah lembaga keseimbangan. Tetapi mungkin juga ada cara informal untuk menegakkan aturan, seperti kemarahan ditampilkan oleh orang-orang di jalan jika pengemudi tidak berhenti. Dengan demikian, keyakinan dan strategi perilaku mencakup mekanisme umpan balik.

Aturan lalu lintas seperti 'berhenti ketika lampu lalu lintas merah' atau 'mengemudi di jalur kanan' adalah ilustrasi yang sangat sederhana. Namun Aoki mengakui bahwa dinamika kelembagaan aktual kemungkinan juga melibatkan

interaksi faktor ekonomi, organisasi, politik dan sosial. Ini sangat menyulitkan masalah dan ditangkap oleh 'domain permainan' pada Gambar-1. Aoki (2001) menyarankan bahwa langkah pertama menuju perawatan analitis dari proses interaktif ini adalah untuk menentukan prototipe domain yang dapat menangkap beberapa elemen esensial minimal dari setiap faktor yang mungkin timbul sebelum interaksi. Ia membedakan empat prototipe:

1. Domain pertukaran ekonomi. Ini adalah domain tempat transaksi barang pribadi berlangsung.
2. Domain pertukaran organisasi dan bidang organisasi. Organisasi dapat menjadi pemain permainan dalam domain pertukaran ekonomi. Pada saat yang sama, organisasi itu sendiri dapat dianggap muncul sebagai lembaga dalam domain kolaborasi kerja.
3. Domain pertukaran politik. Domainnya dalam prototipe terdiri dari dua jenis agen: pemerintah dan beberapa agen swasta. Struktur asimetris ini agak mirip dengan prototipe organisasi yang muncul dalam domain kerja kolaboratif. Namun mereka berbeda, dalam hal itu ... dalam domain pertukaran politik opsi keluar tidak terbuka untuk agen-agen swasta. Pemerintah dapat menyediakan barang publik kepada agen-agen swasta ... dengan imbalan ekstraksi biaya dalam bentuk pajak, pengeluaran uang, dll. Tetapi kenyataan bahwa pemerintah memiliki kekuatan seperti itu juga dapat menyiratkan bahwa ia mungkin memiliki kekuatan untuk melampaui batas. berbagai hak agen swasta Agen-agen swasta dapat merespons dengan mendukung / menolak / menyerahkan-kepada pilihan pemerintah ... dengan / tanpa koordinasi timbal balik di antara mereka sendiri.
4. Domain pertukaran sosial. Domain ini dapat dikonsepsikan sebagai simbol simbol sosial (bahasa, ritual, gerakan, hadiah, dll.) Yang secara langsung memengaruhi hadiah

pemain, seperti penghargaan, penolakan emosional, simpati, pengabaian jinak, dan sebagainya diserahkan dan / atau dipertukarkan secara sepihak dengan obligations kewajiban yang tidak ditentukan untuk membalas. Lembaga-lembaga yang muncul dalam jenis domain ini dapat diidentifikasi dengan kebiasaan dan norma sosial yang ditegakkan oleh ancaman pengucilan sosial, (Aoki, 2007).

Lingkungan Kelembagaan, Transfer Risiko dan Pemberlakuan Kontrak Lingkungan kelembagaan juga muncul sebagai kendala bagi manajemen yang berhasil. Institusi informal, dalam banyak kasus, dalam analisis yang berbeda diambil sebagai masukan dan menyediakan ruang institusional di mana mereka beroperasi, seperti adat istiadat, kebiasaan, tradisi, norma, budaya, dll. Namun, dalam hal ini juga agama sangat penting. Tingkat lembaga informal ini seringkali berada di luar ruang lingkup ekonomi dan politik.

Lingkungan kelembagaan yang terjadi melalui lembaga-lembaga formal adalah tingkat ekonomi pertama yang harus diubah sesegera mungkin, sementara manajemen, berurusan dengan unit terakhir dari tindakan ekonomi dan itu adalah transaksi. Pada tingkat realitas ini, secara praktis tercermin fungsi sistem sosial dan ekonomi. Sering kali, karena juga tindakan lembaga formal tidak sempurna dan gratis, peserta dalam transaksi berorientasi pada solusi pribadi dan alternatif yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan bahwa dalam bentuk mewujudkan saling menguntungkan (layanan notaris, petugas pengadilan swasta, arbitrase, administrator kebangkrutan, dll.). Dalam kebanyakan kasus, perubahan dalam lingkungan kelembagaan dikembangkan lebih lambat daripada perubahan di tingkat manajemen. Suatu lembaga berubah secara umum, tidak cukup hanya mengubah aturan formal, yang menjadi tanggung jawab otoritas negara, tetapi juga harus dipengaruhi dalam aturan informal, yang dibuat sesuai dengan logika dan dinamika

tertentu, tetapi di sisi lain, seharusnya tidak pergi mengesampingkan penerapan aturan-aturan ini.

D. Human and Social Capital dalam NIE dan Economic Growth

Peran human capital dan social capital dalam mendorong terbentuknya ekonomi kelembagaan baru yang dinamis semakin dibutuhkan. Mari kita mulai dengan motivasi manusia dan struktur sosial. Ini termasuk sejauh mana: orang-orang dalam masyarakat saling memperhatikan kesejahteraan satu sama lain; warga dijiwai dengan kebajikan sipil yang memotivasi mereka untuk mengikuti politik dan memilih dalam pemilihan; pejabat publik dan guru sekolah dimotivasi oleh sesuatu selain pemaksimalan kekayaan; jejaring sosial yang ada di antara orang-orang dalam profesi serupa dan lintas kelas dan profesi; dan tingkat keragaman etnis dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Dalam catatan fasih baru tentang pembangunan "Pembangunan sebagai kebebasan" (1999), Amartya Sen berpendapat bahwa manusia mendefinisikan diri mereka sendiri dan termotivasi oleh apa yang mereka lakukan sebanyak apa yang mereka konsumsi. Daripada hanya menggunakan kemampuan kami untuk mendapatkan upah dan mengkonsumsi barang, kami juga menggunakan hak kami untuk mengembangkan kemampuan kami.

Unggul dalam menggunakan kemampuan kami memberi kami kepuasan yang sama banyaknya dengan mengkonsumsi barang. Meskipun mungkin lebih murah untuk memberikan pembayaran kesejahteraan yang besar kepada orang cacat daripada membuat setiap kursi roda dapat diakses sebagai cara untuk mempertahankan tingkat konsumsi orang cacat pada tingkat yang wajar, ini mungkin bukan cara yang optimal untuk mengatur masyarakat, karena mengabaikan kepuasan orang cacat bisa didapatkan dengan melakukan

pekerjaan mereka dengan baik. Dalam konteks pembangunan ini memberikan argumen untuk "perdagangan bukan bantuan" atau setidaknya "pasar terbuka dan reformasi kelembagaan bukan pemberian".

Pandangan sempit para ekonom tentang perilaku manusia bahwa orang itu rasional dan egois berguna ketika mendesain institusi swasta tetapi tidak selalu membantu untuk desain institusi politik. Orang-orang memang memilih dan di beberapa masyarakat pegawai negeri sipil tidak menerima suap ketika mereka ditawarkan. Teori motivasi manusia yang beralasan secara empiris itu konsisten dengan argumen evolusioner dan membuat prediksi yang berguna dan umumnya akurat sangat diperlukan, tetapi tidak ada yang mendekati penyelesaian.

Saya sekarang beralih ke set kedua institusi dalam skema: institusi politik. Lembaga-lembaga politik terdiri dari metode pemilihan pemerintah (kediktatoran dan demokrasi), pemisahan kekuasaan di dalam pemerintah (apakah eksekutif, legislatif dan yudikatif dipilih secara terpisah dan de facto independen satu sama lain), sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan peraturan melalui referendum, bagaimana kekuasaan diberikan kepada pemerintah federal dan lokal, dan keberadaan pers yang bebas. Karya historis North (1983, 1990), Olson (1993) dan lainnya berpendapat bahwa demokrasi menciptakan fondasi politik hak kepemilikan yang aman. Memang, tampaknya demokrasi diciptakan untuk melindungi hak-hak pedagang dan bangsawan dari pengambilalihan oleh raja. Warga cenderung memilih pemerintah yang secara sistematis melanggar hak-hak properti; memang, tidak ada pemerintah yang menghadapi disiplin politik demokratis yang pernah menghapuskan properti pribadi. Pekerjaan ekonometrik baru-baru ini menunjukkan bahwa hak properti lebih aman di negara demokrasi daripada negara otokrasi, dan tingkat korupsi lebih rendah di negara demokrasi stabil.

Selain pertanyaan tentang apakah pemilu diadakan atau tidak, ada masalah berapa banyak pemilu diadakan. Pemilu terpisah untuk eksekutif, legislatif dan bahkan cabang pemerintahan lainnya seperti jaksa agung dapat membantu menjaga kejujuran pemerintah. Pengenalan surat suara yang panjang, di mana warga negara secara langsung memilih sejumlah besar pejabat publik adalah bagian dari reformasi pemerintah daerah, yang mengubah politik lokal di Amerika dari yang umumnya tidak jujur menjadi jujur pada umumnya. Di hampir semua negara berkembang, jaksa agung di semua tingkat pemerintahan ditunjuk oleh eksekutif. Di sana, para pejabat dengan sopan mengatakannya insentif yang lemah untuk menyelidiki cabang eksekutif. Korupsi, yang merupakan tuntutan pidana, hanya dapat dituntut oleh kantor jaksa agung di banyak negara dan akibatnya kasus korupsi terhadap pemerintah yang duduk jarang terjadi. Sebaliknya, di A.S., 44 dari 50 negara bagian telah memilih langsung jaksa agung. Para pejabat ini tidak terikat pada cabang eksekutif dan bahkan mungkin memiliki insentif positif dalam hal karier politik mereka untuk berhasil melakukan investigasi tingkat tinggi. Setelah kasus diajukan dan fakta ditemukan di tingkat lokal, bahkan seorang jaksa agung yang ditunjuk secara politis di pemerintah federal tidak dapat membiarkan kasus-kasus tersebut dituntut dengan baik di pengadilan federal. Dalam analisis eksperimental Azfar dan Nelson (2007) menemukan bahwa jaksa agung yang dipilih secara langsung lebih waspada daripada jaksa agung yang ditunjuk.

E. Keterkaitan Ekonomi Kelembagaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan ekonomi kelembagaan baru dengan pertumbuhan ekonomi suatu Negara semakin menarik untuk terus dikaji lebih mendalam. Ekonomi kelembagaan baru adalah bidang yang berkembang yang memikirkan banyak pertanyaan

relevan yang mengganggu perekonomian dunia saat ini. Di jantung dari tantangan ini, terletak pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal untuk banyak negara termiskin di dunia serta hambatan pemerintah untuk mencapai kemakmuran bersama. Faktor pertumbuhan perlu dibarengi dengan lembaga progresif (publik) yang merangsang pasar berbasis insentif di mana inovasi dan pencapaian individu berkuasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan teori ekonomi baru-baru ini yang didasarkan pada institusionalisme baru untuk menilai berbagai tingkat perkembangan kelembagaan dan implikasinya terhadap pertumbuhan. Juga, dengan meluaskan pada desakan Kenneth Arrow bahwa pengamatan yang tajam harus selalu hadir dalam ekonomi modern yang digerakkan oleh matematika, saya menunjukkan sejumlah contoh dari abad yang lalu hingga saat ini, untuk lebih jauh menjelaskan kasus saya. Secara alami, saya mengandalkan teknik empiris berdasarkan analisis regresi untuk memvalidasi atau menolak argumen berdasarkan tinjauan pustaka dan analisis historis subjek. Saya juga meninjau literatur ekonomi kelembagaan baru terutama dari 1990-2012. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai negara yang dapat dicontohkan untuk menghubungkan pengembangan kelembagaan dengan berbagai tingkat pertumbuhan ekonomi. Ini akan berperan dalam mengintegrasikan model konseptual ke hasil yang mungkin dari karya empiris.

Temuan utama mungkin dapat memberikan bukti sejalan dengan intuisi a priori saya bahwa institusi yang baik sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Lembaga yang baik dapat digambarkan sebagai yang merangsang kinerja pasar bebas, mendukung inovasi dan perubahan teknologi, dan pada akhirnya menjamin kebebasan ekonomi dan kebebasan individu. Namun, perlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi di bawah lembaga ekstraktif

seperti Cina modern, di mana populasi yang tertekan secara politis berhasil mendapatkan kualitas hidup yang lebih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan dengan analisis industri atau studi tingkat makro. Dalam kasus yang terakhir, minat utama berkisar pada data tingkat negara dan khususnya tingkat pengembangan kelembagaan yang dapat dicapai. Data sampel akan mencakup semua data yang tersedia untuk semua negara dan semua kerangka waktu yang tersedia. Karena ini adalah studi tingkat makro, sebagian besar variabel akan diketahui oleh pembaca, tetapi mungkin sebagian besar tidak akan menyadari besarnya masing-masing variabel pada hasil akhir.

Model konseptual akan didasarkan pada teori fundamental ekonomi kelembagaan baru. Jelas, institusi yang baik akan memperlengkapi negara-negara untuk keberhasilan ekonomi dan kemakmuran dalam jangka panjang (Acemoglu, Simon, dan Robinson, 2000) 2. Tesis utama di balik ini adalah bahwa lembaga yang memadai mengamankan hak milik dan kesucian kontrak, yang merupakan prasyarat untuk inovasi dan kewirausahaan. Penting untuk menekankan ide perspektif jangka panjang, karena banyak pembuat kebijakan telah tertipu oleh keuntungan jangka pendek sementara sama sekali mengabaikan kelemahan struktural. Lebih khusus lagi, argumen ini dapat dibuktikan dengan keputusan pemerintah untuk memastikan independensi bank sentral untuk menghindari manipulasi politik atau godaan untuk menembak untuk pertumbuhan jangka pendek selama periode pemilihan. Keberhasilan ekonomi secara alami tergantung pada faktor-faktor seperti investasi langsung asing seperti yang disebutkan oleh Cárdenas (2009). Juga, risiko pengambilalihan memiliki implikasi ekonomi yang besar bagi banyak negara yang menunjukkan kecenderungan ini. Indeks kemampuan pemerintahan menangkap seberapa baik pemerintah dapat menggunakan otoritas berdasarkan kekuatannya untuk mengirimkan barang publik kepada penduduknya.

Saya bisa lebih spesifik dalam mendefinisikan kemampuan pemerintahan yang baik dengan mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Bank Dunia (2009) yang menekankan hal-hal berikut:

- 1) Sejauh mana warga negara dapat secara aktif terlibat dan berpartisipasi dalam pemilihan resmi, kebebasan berbicara, dan media serta komunikasi.
- 2) Stabilitas politik, tidak adanya kegiatan kriminal, dan terorisme yang dirasakan oleh warga negara. Pandangan ini memperhitungkan kemungkinan pemerintah digulingkan oleh perilaku kriminal atau pemberontak.
- 3) Efektivitas pemerintah dalam memberikan layanan publik dan layanan sipil. Indikator ini juga menilai kredibilitas pemerintah dan transparansi serta komitmen pemerintah untuk memenuhi dan memenuhi janji.
- 4) Ukuran tidak adanya beban fiskal yang merusak inisiatif sektor swasta dan insentif untuk berinvestasi dan menciptakan.
- 5) Ukuran persepsi warga tentang kemampuan pemerintah untuk menjamin sanksi hukum, hak properti, impunitas, antara lain. Ini pada dasarnya menghasilkan indikator kepercayaan untuk menentukan apakah pemerintah benar-benar bertindak demi kepentingan terbaik warganya.
- 6) Mungkin yang paling umum: persepsi korupsi. Indikator ini berupaya untuk mengukur tidak hanya korupsi pemerintah yang langsung tetapi juga tingkat korupsi "elit" atau beberapa agen sektor swasta.

Pendekatan Institusional untuk ekonomi dapat ditelusuri kembali ke Thorstein Veblen, meskipun Ronald Coase lebih dikenal untuk menghubungkan ekonomi dengan hukum dan mempelajari institusi dan hasil ekonomi mereka. Sebagai permulaan, Coase (1937) dan pendekatan eksternalitas yang dikenal di kalangan ekonom sebagai teorema Coase telah

memungkinkan para peneliti untuk memperluas pentingnya hak kepemilikan. Teorema menyatakan bahwa ketika ada konflik mengenai hak-hak properti, negosiasi individu dan perundingan mengarah pada hasil yang lebih baik, lebih efisien daripada hak-hak properti tertentu yang ditugaskan. Pada dasarnya, pernyataan prinsip di balik teorema Coase percaya bahwa pasar kompetitif akan menentukan perusahaan mana yang dapat menggulingkan yang lain dan hak properti tidak akan menghalangi solusi optimal untuk masalah teoretis game ini.

Menyusul pekerjaan Coase, Douglas North, seorang Pemenang Nobel, juga telah banyak menulis dan memperluas hak-hak properti dan bagaimana penegakan hukum yang memadai memberikan insentif yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi. Juga, ada cara hidup primitif yang tidak berhubungan dengan konsep kepemilikan pribadi Utara (1991) karena tanah diyakini berasal dari alam yang secara intuitif berarti tidak ada kepemilikan individu melainkan penggunaan kolektif untuk kepentingan bersama. Misalnya, banyak suku Indian di Kolombia sangat dikucilkan; oleh karena itu mereka menemukan kenyamanan di antara mereka sendiri. Dalam masyarakat mereka, mereka berusaha untuk menghasilkan makanan dan mendapatkan perbedaan di antara rekan-rekan mereka; namun mereka tidak memiliki insentif atau banyak peluang untuk bersaing dan mendapatkan tempat mereka dalam ekonomi berbasis pasar Kolombia. Dalam literatur yang lebih baru, terutama Acemoglu (2008) dan Robinson (2008), berpendapat bahwa pengembangan kelembagaan adalah pendorong utama di balik kemakmuran berumur panjang.

F. Simpulan dan Rekomendasi

Peran penting ekonomi kelembagaan keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk kesejah-

teraan masyarakat pada saat ini dan mendatang semakin penting dan menarik untuk terus dikaji. Berbagai studi literature dan empiris baru bercerita secara historis pentingnya berbagai parameter ekonomi kelembagaan. Namun masih belum banyak yang mengkaji secara empiris dengan data mikro fundamental yang semakin nyata dengan kehidupan masyarakat. Salah satu kekelelahan yang menonjol dalam teori kelembagaan yang diperoleh adalah masih dominannya peran politik kenegaraan di suatu Negara. Oleh karena itu, masih perlu dikaji dengan data empiris yang sifatnya lebih mendalam.

G. Referensi

- Acs, Z. (2009). *How Is Entrepreneurship Good for Economic Growth*, Tagore LLC Innovations: Technology, Governance. *Globalization 1* (1) 97–107.
<http://www.mitpressjournals.org/doi>
- Aghion, P., Akeigit, U., and Howitt, P. (2015). *The Schumpeterian Growth Paradigm*, Annual Review of Economics, All rights reserved is online at economics, annualreviews.org
- Akeigit, U. (2017). Economic Growth: The Past, the Present, and the Future," *Journal of Political Economy*, Vol. 125 (6), 1736-1747
- Aparicio, S., & Urbano, D. (2018). Entrepreneurship and regional economic growth in Antioquia: An empirical analysis, *Economics and Business Letters*, Vol. 7, No. 2, pp. 84-91
- Bell, d L. (2013). *Entrepreneurship and Local Economic Growth in Emerging Markets*, Version, HU University of Applied Sciences Utrecht, leendert.debell@hu.nl
- Bello, A., Jibir, A., and Ahmed, I. (2018). Impact of Small and Medium Scale Enterprises on Economic Growth: Evidence from Nigeria, *Global Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No. 2 , 2018, pp. 236 – 244.

- Beugelsdijk, S., Mariko, K., and Petros, M. (2018). *Regional economic development in Europe: the role of total factor productivity*, To link to this article:
<https://doi.org/10.1080/>
- Bjørnskov, C., & Foss, Nj. (2018). Institutions, Entrepreneurship, and Economic Growth: What Do We Know and What Do We Still Need to Know, *Academy of Management Perspectives*, 2016, Vol. 30, No. 3, 292–315.
- Carree, M. & Thurik, R. (2010). The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth. Z.J. Acs, D.B. Audretsch, *International Handbook of Entrepreneurship Research*, (pp. 557–594). New York: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1191-9_20
- Coscia, M., Cheston, T., and Hausmann, R. (2017). *Institutions vs. Social Interactions in Driving Economic Convergence: Evidence from Colombia*, CID Faculty Working Paper No. 331, Harvard University.
- Doran, J., McCarthy, N., and O'Connor, M. (2018). The role of entrepreneurship in stimulating economic growth in developed and developing countries, *Cogent Economics & Finance*, 6: 1442093, open asses:
<https://doi.org/10.1080/23322039>.
- EIB (European Investment Bank), (2015). *Financing SMEs to drive economic growth*, EFSI to every corner of Europe; ČMZRB, www.eib.org/smes.
- Esther, ON., David, ET., and Scholastica, EU. (2018). Effect of Small and Medium Enterprises on Economic Growth in Nigeria, *Sumerianz Journal of Business Management and Marketing*, Vol. 1, No. 2, pp. 73-78
- Fritsch, M., & Jordaan, JA. 2018. Policy Brief on Entrepreneurship, industrial diversification and economic growth in EU regions, *Financial and Institutional Reforms for Entrepreneurial Society (FIRES)*, Vol. 18, No.08, pp. 1-5.
- Gomaa, MM. (2014). Competition and Economic Growth: An Empirical Analysis with Special Reference to MENA

Countries, *Topics in Middle E astern and African Economies*, Vol. 16, No. 2, pp. 192-213.

- Hadis, S., and Ali, Y. (2018). Micro and Small Enterprises in Ethiopia; Linkages and Implications: Evidence from Kombolcha Town, *International Journal of Political Science and Development*, Vol. 6(1), pp. 16-26
- Karadag, H. (2016). The Role of SMEs and Entrepreneurship on Economic Growth in Emerging Economies within the Post-Crisis Era: an Analysis from Turkey, ResearchGate, <https://www.researchgate.net/publication/314074436>
- Korez RV., and Tominc, P. (2016). Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth, *Competitiveness of CEE Economies and Businesses*, Springer International Publishing Switzerland, University of Maribor, Maribor, Slovenia
- Kreft, SF., Sobel, RS. (2003). *Public Policy, Entrepreneurship, and Economic Growth*, J.E.L. classification: H7, O1, J0
- Lin, X., Box, M., and Gratzner, K. (2014). *Linking Entrepreneurship and Economic Growth*, PESO Working Paper 1, School of Social Sciences; Södertörn University.
- OECD. (2018). *Financing SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard*, More information: www.oecd.org/cfe/sme, Join the conversation on Twitter: follow OECD SMEs, Regions, Cities.
- Ogunlana, F. (2018). *The Role Of Entrepreneurship As The Driver Of Economic Growth*, Centria University of Applied Sciences. Pp, 40-44
- Osunde, C. (2016). Strategies for Economic Growth: Micro, Small and Medium Enterprises in Rural Areas of Nigeria, *Business and Economics Journal*, Volume 7 • Issue 4, pp.1-4., open access journal.
- Naushad, M., Faridi, MR., and Malik, SA. (2018). Economic Development Of Community By Entrepreneurship: An Investigation Of The Entrepreneurial Intent and the Institutional Support to the Local Community in Al-

- Kharj Region, *The International Journal Entrepreneurship and Sustainability Issues*, ISSN 2345-0282, Volume 5, Number 4, pp. 899-913.
[http://doi.org/10.9770/jesi.2018.5.4\(14\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2018.5.4(14))
- Prasetyo, PE. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, *Jurnal AKMENIKA*, UPY, Volume 2, Nomor 1, pp 1-13.
- Prasetyo, PE. (2014). Economic Policy Impact on Competitiveness and Efficiency of Textile Industry in Central Java, *Economic Journal of Emerging Market*, Vol. 6, No. 2, pp. 85-95.
- Prasetyo, PE. (2017). Standarisasi dan Komersialisasi Produk Industri Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah, *Prosiding Seminar Nasional Multi-disiplin Ilmu & Call Paper*, Sendu_U3. Juli, Semarang: UNISBANK.
- Sari, DN., and Alam, Q. (2008). *Internationalisation of Small Medium Sized Enterprises in Indonesia: Entrepreneur Human and Social Capital*, PhD Thesis View project, <https://www.researchgate.net/publication/228340110>
- Soriano, DR. (2017). Small business and entrepreneurship: their role in economic and social development, *Entrepreneurship & Regional Development an International Journal*, VOL . 29, NOS . 1–2, 1–3, <http://dx.doi.org/>
- Stam, Erik. (2018). Measuring Entrepreneurial Ecosystems, *Annual Conference of the European Entrepreneurial Regions*, https://cor.europa.eu/Erik-Stam_Measuring-Entrepreneurial-Ecos.
- Stam, Erik. (2015). *Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique*, Discussion Paper Series nr: 15-07. www.koopmansinstitute.uu.nl
- Tahir, HM., Razak, NA., and Rentah, F. (2018). *The Contributions Of Small and Medium Enterprises (SME's) On Malaysian Economic Growth: A Sectoral Analysis*,

Springer Nature Singapore, Pte Ltd.

<https://doi.org/10.1007/>.

- Thurik, R. (2009). *Entrepreneurship, Economic Growth and Policy in Emerging Economies*, Research Paper, No.12, UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), publications@wider.unu.edu
- Zafar, A., and Musfafa, S. (2017). SMEs and its role in economic and socio-economic development of Pakistan, *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 6, No. 4, pp. 1-16.